Pemerintah
Kabupaten Jombang

RENCANA KERJA 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG

dlh.jombangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Prof. Dr. NurcholishMadjid No. 80 Telp. (0321) 864123 Fax. -
JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 188/ 24 /415.34/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang :

a bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi OPD serta untuk memberikan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan menetapkannya dalam Keputusan Dinas Lingkungan Hidup.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
2. Mengadakan koreksi dan perbaikan atas hasil pekerjaan tim baik pada sistematika dokumen, tahapan penyusunan maupun pelaporan penulisan;
3. Memberikan kontribusi pemikiran secara aktif terhadap penyempurnaan pekerjaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
4. Memastikan konsistensi dan arah pekerjaan berdasarkan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud Diktum PERTAMA berpedoman pada ketentuan Peraturan PerUndang- Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Membebankan segala pembiayaan pelaksanaan kegiatan Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal :16 Februari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

MIFTAHUL ULUM, S.T, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19710117 200112 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ 24 /415.34/2024
TANGGAL : 16 Februari 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Sekretaris	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup,
3	Anggota	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
		Kepala Bidang Konservasi Lingkungan
		Kepala Bidang Tata Lingkungan
		Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
		Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan RTH.
		Kasubag Keuangan dan Asset
		Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Ka UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
		Ka. UPT Pengelolaan Sampah
		Seluruh Fungsional Dinas Lingkungan Hidup
		Staf Penyusunan Program dan Evaluasi

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 16 Februari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

MIFTAHUL ULUM, S.T, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19710117 200112 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan hidayah-Nya maka Penyesuaian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029. RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 merupakan fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026 telah tersusun sehingga setiap tahun dilakukan penyusunan Rencana Kerja sehingga Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 memuat tentang evaluasi dan analisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang tahun 2025 telaahan terhadap Program Nasional terkait Bidang Lingkungan Hidup, serta program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan indikatif anggaran untuk tahun 2025.

Terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan bekerja sama dalam penyusunan buku ini. Semoga Buku Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025 bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Jombang, 13 Juli 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jombang

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

MIFTAHUL ULUM, S.T, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19710117 200112 1 003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.3.1. MAKSUD 4

1.3.2. TUJUAN 4

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PD 7

2.2. ANALISIS KINERJA SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 17

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 22

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 25

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT . 37

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 42

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 46

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 47

BAB IV PENUTUP 68

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DLH Kabupaten Jombang Tahun 2023..... 9

TABEL 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2023 17

TABEL 2.3 Review Rancangan awal RKPD Tahun 2023 Kab. Jombang..... 26

TABEL 2.4 Usulan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 38

TABEL 3.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024..... 43

TABEL 3.2 Rancangan Renja SKPD Tahun 2025 Usulan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Indikatif Anggaran Dinas Lingkungan Hidup 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombangtahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang tahun 2024-2026. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah, bahwa setiap Organisasi PerangkatDaerah (OPD)harus memiliki Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis OPD (Renstra OPD).

Renja disusun dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator beserta Target Program dan Kegiatan, serta pagu indikatif selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2025 yang memuat Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 juga merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 merupakan Tahun Kedua dari Penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Jombang Tahun 2024 – 2026 dengan rangkaian pelaksanaan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jombang, sesuai

dengan Tujuan Pembangunan. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi window opportunity untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Tema RKP pada tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Merujuk pada penyesuaian tema pembangunan nasional tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025 disesuaikan pula, menjadi **"Penguatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Melalui Hilirisasi Agrobisnis"**, dengan mengusung 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM, Pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan Yang Harmonis;
2. Peningkatan Layanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas;
3. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Merata.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Jombang nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Mpmenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jomban (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 1/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024;
21. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 050/844/415.01/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja) PD Tahun 2025

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025 mempunyai maksud:

a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pengelolaan lingkungan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan tahun 2025 yang telah ditetapkan dapat tercapai;
b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, analisis, monitoring, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan;
d. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah:

a. Menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
b. Menjadi pedoman pengelolaan lingkungan hidup secara tepat dan terencana sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c. Mewujudkan sikap tanggap terhadap isu-isu lingkungan yang berkembang;
d. Mengembangkan sikap dan tindakan sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan;
e. Mengembangkan pemikiran dalam menyikapi persoalan-persoalan lingkungan sebagai upaya pengendalian dan pemulihan;
f. Mengembangkan pemikiran yang berorientasi pada masa depan;
g. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan;
h. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DANKEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 adalah tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2018 – 2023 dengan Visi **"Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing",** dan Misi **"Menigkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan potensi unggulan lokal dan industri".** Berdasarkan perumusan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi, maka pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut dilakukan oleh masing-masing Bidang, Seksi dan UPT sebagaimana susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2025 dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 adalah :

a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman, dimana sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah:
    - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terbagi kedalam sub indeks penyusun IKLH yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)
b. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan, dimana sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah:
    - Indeks layanan pengelolaan persampahan
c. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah:
    - Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah.

Dalam mewujudkan arah kebijakan dan sasaran di dalam Renstra tersebut, telah direalisasikan kedalam 8 Program dan 15 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan pada tahun 2023. Secara keseluruhan capaian kinerja organisasi pada tahun 2023 sudah berhasil mencapai 109,16% dengan serapan anggaran sebesar 94,10%. Berbagai upaya perlindungan, pencegahan pencemaran, pengendalian kualitas, maupun konservasi dan perbaikan kualitas lingkungan telah dilaksanakan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja yang telah dibuat pada awal tahun. Namun laju degradasi lingkungan lebih cepat dibandingkan segala upaya yang telah dilakukan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis diuraikan dalam tabel 2.1. Capaian kinerja dan penyerapan anggaran yang dievaluasi adalah tahun 2023 karena merupakan tahun kelima Renstra 2018-2023.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DLH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Prosentase peningkatan tutupan lahan di kawasan lindung**	**200,00**	**persen**	**97,58**	**persen**	**100**	**persen**	**123,92**	**persen**	**124%**	**N/A**	**persen**	**221,50**	**110,75%**
		Prosentase sampel yang memenuhi baku mutu	**74,89**	**persen**	**38,89**	**persen**	**36,36**	**persen**	**58,10**	**persen**	**160%**	**N/A**	**persen**	**96,99**	**129,51%**
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah emisi GRK yang dikurangi	90.788	*ton CH4/ tahun*	*44.672*	*ton CH4/ tahun*	46.116	ton CH4/ tahun	52.260	ton CH4/ tahun	113%	N/A	CH4 ton/th	**96.932,00**	**106,77%**
		Jumlah Lokasi pemantauan kualitas lingkungan	126	*lokasi*	*71*	*lokasi*	55	lokasi	75	lokasi	136%	N/A	lokasi	**146,00**	**115,87%**
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhad	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	148	dokumen	N/A	dokumen	148	dokumen	148	dokumen	100%	133	dokumen	**281,00**	**189,86%**
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	dokumen	N/A	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	**2,00**	**200,00%**
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	5	dokumen	N/A	dokumen	5	dokumen	5	dokumen	100%	5	dokumen	**10,00**	**200,00%**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas lahan yang ditangani untuk pemulihan pencemaran	7,66	*Ha*	5,06	*Ha*	2,60	Ha	2,60	Ha	100%	4	Ha	**7,66**	**100,00%**
		Jumlah volume LB3 yang diangkut	961.360	kg	472.360	kg	489.000	kg	515.170	kg	105%	522.000	kg	**987.530**	**102,72%**
2.11.03.2.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1	dokumen	N/A	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	**2,00**	**200,00%**
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	dokumen	N/A	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	**2,00**	**200,00%**
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LING**	**Persentase jumlah rekomendasi yang diterbitkan sesuai standar**	**200**	**persen**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100%**	**100**	**Persen**	**200,00**	**100,00%**
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbi	Persentase rekomendasi teknis yang dinilai kelayakannya	200	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100%	100	Persen	**200,00**	**100,00%**
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	38,75	persen	18.75	persen	20	persen	20,00	persen	100%	20	persen	**40,00**	**103,23%**
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3	dokumen	N/A	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100%	3	dokumen	**6,00**	**200,00%**
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemer	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	207	laporan	32	laporan	175	laporan	175	laporan	100%	175	Laporan	**207,00**	**100,00%**
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan yang tertangani**	**200**	**persen**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100%**	**100**	**persen**	**200,00**	**100,00%**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab	Persentase berita acara hasil verifikasi lapangan yang dibuat	200	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	**200,00**	**100,00%**
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	30	dokumen	N/A	dokumen	30	dokumen	31	dokumen	103%	30	dokumen	**61,00**	**203,33%**
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase kader aktif**	**20**	**persen**	**10**	**persen**	**10**	**persen**	**10**	**persen**	**100%**	**10**	**persen**	**20,00**	**100,00%**
		Persentase lembaga aktif	**108,04**	**persen**	**54,04**	**persen**	**54,04**	**persen**	**59,60**	**persen**	**110%**	**55**	**persen**	**113,64**	**105,18%**
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kader aktif yang didampingi	60	orang	20	orang	40	orang	40	orang	100%	15	orang	**60,00**	**100,00%**
		Jumlah lembaga dan kelompok masyarakat yang aktif	267	lembaga / kelompok	127	lembaga / kelompok	140	lembaga/ kelompok	152	lembaga / kelompok	109%	113	lembaga / kelompok	**279,00**	**104,49%**
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemas	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	481	lembaga / kelompok	235	lembaga / kelompok	246	lembaga/ kelompok	255	lembaga / kelompok	104%	246	lembaga / kelompok	**490,00**	**101,87%**
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	dokumen	N/A	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	**2,00**	**200,00%**
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	400	orang	N/A	orang	400	orang	400	orang	100%	400	orang	**800,00**	**200,00%**
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Penambahan luas tutupan lahan RTH**	**200,00**	**persen**	***97,86***	**persen**	**100**	**persen**	**100,00**	**persen**	**100%**	**100**	**persen**	**197,86**	**98,93%**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
		Persentase Penambahan luasan Tutupan lahan di Taman Kehati	**7,67**	**persen**	***3,67***	**persen**	**4,33**	**persen**	**4,33**	**persen**	**100%**	**4**	**persen**	**8,00**	**104,30%**
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penambahan Luasan tutupan RTH	0,25	Ha	*0,25*	Ha	0,25	Ha	0,25	Ha	100%	0,25	Ha	**0,50**	**200,00%**
		Penambahan Luasan Tutupan lahan di Taman Kehati	0,5	Ha	*0,5*	Ha	0,30	Ha	0,30	Ha	100%	0,30	Ha	**0,80**	**160,00%**
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Ha	4	Ha	4	Ha	4	Ha	100%	4	Ha	**8,00**	**200,00%**
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11,67	Ha	11,42	Ha	11,67	Ha	11,67	Ha	100%	11,67	Ha	**23,09**	**197,86%**
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100	orang	50	orang	50	orang	50	orang	100%	50	orang	**100,00**	**100,00%**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase daya dukung sarana persampahan**	**200,00**	**Persen**	***100,00***	**Persen**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100%**	**100,00**	**Persen**	**200,00**	**100,00%**
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daya dukung sarpras persampahan	81	Unit	*48*	Unit	33	unit	33	unit	100%	30	Unit	**81,00**	**100,00%**
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	600	RT	N/A	RT	600	RT	600	RT	100%	600	RT	**600,00**	**100,00%**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan**	**57,14**	**Persen**	***54,90***	**Persen**	**57**	**persen**	**57**	**persen**	**100%**	**57**	**Persen**	**112,04**	**196,08%**
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola (penanganan + pengurangan)	78799	Unit	*80000,84*	Unit	78.799	ton/tahun	84.034	ton/tahun	107%	78.799	Unit	**164.034,84**	**208,17%**
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	4	Laporan	N/A	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100%	-	Laporan	**4,00**	**100,00%**
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	52.779	Ton	53.947	Ton	52.779	ton/tahun	55.926	ton/tahun	106%	52.779	Ton	**109.873,00**	**208,18%**
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20	Kelompok	0	Kelompok	20	Kelompok	20	Kelompok	100%	20	Kelompok	**20,00**	**100,00%**
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11	unit	0	unit	11	unit	11	unit	100%	11	unit	**11,00**	**100,00%**
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur**	**200,00**	**persen**	***100,00***	**persen**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100%**	**100**	**persen**	**199,74**	**99,87%**
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	200,00	persen	*100,00*	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	**200,00**	**100,00%**
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	2	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100%	3	dokumen	**5,00**	**100,00%**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	1	dokumen	5	dokumen	5	dokumen	100%	5	Laporan	**6,00**	**100,00%**
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	200	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	**200,00**	**100,00%**
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	orang/bulan	12	orang/bulan	35	orang/bulan	35	orang/bulan	100%	35	orang/bulan	**47,00**	**134,29%**
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	12	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	4	dokumen	**16,00**	**400,00%**
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	**4,00**	**66,67%**
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	**200,00**	**200,00%**
2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	Laporan	**2,00**	**200,00%**
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	**200,00**	**20000,00%**
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	26	paket	1	paket	1	paket	100%	1	paket	**27,00**	**2700,00%**
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	63	paket	1	paket	1	paket	100%	1	paket	**64,00**	**6400,00%**
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	12	paket	1	paket	1	paket	100%	1	paket	**13,00**	**1300,00%**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50101	paket	50101	paket	1	paket	1	paket	100%	1	paket	**50.102,00**	**100,00%**
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	**4,00**	**200,00%**
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46	Laporan	102	Laporan	70	Laporan	99	Laporan	141%	46	Laporan	**201,00**	**436,96%**
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	200	Persen	100	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	**200,00**	**100,00%**
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras yang disediakan	204	unit	141	unit	63	unit	63	unit	100%	23	unit	**204,00**	**100,00%**
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	200	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	**200,00**	**100,00%**
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13	Laporan	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	**13,00**	**100,00%**
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Laporan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	**6,00**	**100,00%**
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	200	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	**200,00**	**100,00%**
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	**2,00**	**100,00%**
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	168	unit	75	unit	93	unit	111	unit	119%	93	unit	**186,00**	**110,71%**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	2	unit	2	unit	2	unit	100%	61	unit	**4,00**	**100,00%**
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	215	Unit	154	unit	61	unit	67	unit	110%	-	unit	**221,00**	**102,79%**

2.2 ANALISIS KINERJA SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Bidang Lingkungan Hidup tidak dicantumkan lagi di dalamnya karena bukan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, memuat Tujuan, Sasaran dengan Indikator dan Target yang harus dipenuhi dalam 3 tahun masa pemerintahan. Dalam perbup tersebut disebutkan bahwa salah satu sasaran Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman dengan dua indikator, yaitu Indeks Infrastruktur Permukiman dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Dalam rangka mewujudkan IKLH agar sesuai target yang telah tercantum dalam RPD, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menetapkan tiga sasaran strategis dengan lima indikator. Tabel dibawah ini menunjukkan capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang pada tahun 2023.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5
Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan TutupanLahan	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	52	55,14	106,04%
	2	Indesk Kualitas Udara (IKU)	73	81,89	112,18%
	3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,4339	44,62	105,15%
Meningkatnyapelayananpengelolaanpersampahan	4	Persentase Layanan pengelolaan persampahan	42,55%	43,41%	102,02%
MeningkatnyaKualitasAkuntabilitasPemerintah	5	Nilai Evaluasi SAKIP	80,12	80,22	100,12%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023					**105,10%**

Sumber :Buku Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) DLH Tahun 2023

Capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 secara keseluruhan mencapai 105,10%. Pencapaian kinerja sasaran tersebut merupakan hasil dari pencapaian

kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahun 2023 terdapat 8 program,15 kegiatan dan 38 sub kegiatan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Target kinerja sasaran secara keseluruhan telah tercapai.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan TutupanLahan memiliki 3 indikator, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan Indeks Pencemaran (IP) dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Sedangkan Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan perubahan dari Indeks Tutupan Hutan yang merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem, Hutan berfungsi sebagai penjaga air, mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah.

Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) tercapai 55,14 Poin dari target 52,00 poin. Indikator ini diukur berdasarkan hasil uji kualitas badan air (air sungai). Pada tahun 2022 lokasi pengambilan sampel air sungai masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu fokus pada 5 (lima) sungai besar yang melintasi Kabupaten Jombang, yaitu Sungai Jarak, Sungai Marmoyo, Sungai Rejoagung, Sungai Konto Surabaya dan Sungai Brantas. Titik-titik pengambilan sampel air sungai tersebut tersebar dari hulu hingga hilir dan diambil dua kali dalam satu tahun, yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Target pengambilan sampel sebanyak 35 titik setiap musim, sehingga selama tahun 2023 telah dilakukan uji kualitas air sungai sebanyak 70 kali. Selain 70 sampel yang dilakukan uji oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, dalam perhitungan angka IKA Kabupaten Jombang juga menambahkan hasil pengujian yang dilaksanakan oleh KLHK (pusat) atas 3 titik pada Sungai Brantas, sehingga total Badan Air yang dipantau kualitasnya untuk menentukan IKA sebanyak 73 sampel (titik). Parameter yang digunakan untuk pengukuran kualitas air sebanyak 8 parameter yaitu *Total Suspended Solid* (TSS), *Power of Hydrogen* (pH), *Biologycal Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Dissolved Oxygen* (DO), *Nitrat* (NO3-), *Total Pospat* dan *Fecal Coliform*. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Ditjen Pengendalian dan

Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 pada tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024. Mutu air sungai yang diuji ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan mengklasifikasikan sungai-sungai tersebut dalam mutu air kelas 2. Berdasarkan rumus perhitungan IKA yang telah ditentukan, nilai IKA Kabupaten Jombang pada tahun 2023 sebesar 55,14 Poin atau masuk dalam bobot indeks Tercemar Ringan. Hasil uji kualitas lingkungan yang telah dilaksanakan pada Badan Air menunjukkan bahwa bobot indeks tercemar ringan tersebut disebabkan oleh adanya senyawa pencemar dari air limbah domestik dan air hujan yang bercampur dengan air limbah.

Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) mencapai 81,89 Poin dari target 73 poin. Indikator ini dihitung berdasarkan hasil uji kualitas udara *Ambient* yang telah dilaksanakan selama tahun 2023. Pemantauan kualitas udara *ambient* di Kabupaten Jombang dilakukan dengan metode *passive sampler*. *Passive sampler* merupakan salah satu metode sederhana yang digunakan untuk pengukuran kualitas udara *ambient* dengan menggunakan parameter ukur SO_2 dan NO_2. Sampel udara *ambient*, diambil di Kecamatan Bareng (mewakili Jombang Selatan), Kecamatan Mojoagung (mewakili Jombang Timur), Kecamatan Ploso (mewakili Jombang Utara) dan Kecamatan Perak (mewakili Jombang Barat) serta di KecamatanJombang (mewakiliJombang Tengah). Sedangkan pada masing-masing kecamatan diambil 4 lokasi, yang mewakili kondisi kawasan komersil (perkantoran yang tidak berpengaruh langsung transportasi), pemukiman padat penduduk (*urban background*), daerah/kawasan industri dan daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat). Upaya pengambilan sampel udara *ambient* pada lima penjuru mata angin pada musim hujan dan musim kemarau tersebut dilakukan agar hasilnya dapat merepresentasikan kondisi kualitas lingkungan di Kabupaten Jombang secara keseluruhan. Sehingga total uji kualitas udara *ambient* yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 adalah 40 kali. Dari hasil uji kualitas udara *ambient* yang dilakukan sebanyak 40 kali, diketahui bahwa kondisi udara *ambient* di Kabupaten Jombang masih baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji pada 20 lokasi berbeda selama musim penghujan dan musim kemarau dengan menggunakan

parameter sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang seluruhnya masih memenuhi baku mutu.

Indikator Kualitas Lahan (IKL) mencapai 44,62 dari target 42,4339 poin. Indikator ini dihitung dengan menambahkan luas tutupan lahan pada Hutan Tanaman, Belukar dalam kawasan hutan dan berfungsi lindung, RTH, Hutan Kota, Taman Kehati dan Upaya rehabilitasi hutan di Kabupaten Jombang yang telah dilaksanakan hingga tahun 2023. Hasil penjumlahan tersebut dikalikan dengan koefisien, kemudian dibagi dengan luas wilayah Kabupaten Jombang. Selanjutnya dihitung berdasarkan rumus IKL yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Ditjen Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 pada tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024. Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar44,62 dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan adanya penambahan hasil citra satelit KLHK terhadap tutupan vegetasi di beberapa tempat yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam kriteria perhitungan. Nilai IKL Kabupaten Jombang ini dipengaruhi oleh tersediaannya RTH (Ruang Terbuka Hijau). Adapun *f*aktor- faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau pada setiap dominasi penggunaan lahan di Kabupaten Jombang, yaitu ketersediaan anggaran, alokasi Ruang Terbuka Hijau dalam perencanaan tata ruang, implementasi rencana kerja terkait RTH, penghargaan dalam program penghijauan, pelaksana program, partisipasi masyarakat, pengaruh tokoh masyarakat, keberadaan komunitas hijau, daya serap pohon terhadap CO_2, ketersediaan lahan, nilai lahan, dan pengawasan pengendalian tata guna lahan.

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan memiliki satu indikator, yaitu persentase layanan pengelolaan persampahan. Indikator persentase pengelolaan persampahan mencapai 43,41% dari target 42,55%. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, tugas Pemerintah Daerah terkait pengelolaan sampah tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan, namun mencakup seluruh wilayah kabupaten. Pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melalui Dinas Lingkungan Hidup meliputi pelayanan

penanganan sampah dan pengurangan sampah. Pada tahun 2023, pelayanan penanganan sampah yang dilaksanakan oleh DLH pada 13 Kecamatan dari total 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang. Pada 13 Kecamatan yang sudah terlayani sudah didirikan TPS/TPS 3R dan sudah dilayani pengambilan oleh kendaraan pengangkut sampah yang mengangkut sampah secara berkala dari TPS/TPS 3R ke TPA. Total tenaga kebersihan pada tahun 2023 adalah sebanyak 426 orang dan jumlah TPS sebanyak 72 unit serta jumlah TPS3R sebanyak 17 unit. Namun dari 17 unit TPS3R yang telah terbangun, baru 13 unit yang sudah beroperasi karena 4 unit lainnya baru terbangun dan beroperasi di tahun 2023. Sedangkan jumlah armada angkut berupa *amroll* sebanyak 16 unit, *dump truck* sebanyak 3 unit dan *compactor* sebanyak 3 unit. Pada tahun 2023 telah dibangun 4 unit TPS 3R baru beserta sarprasnya dalam rangka mendukung upaya pengurangan sampah. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan terhadap sekolah-sekolah dan desa binaan serta para pelaku usaha. Total sampah yang sudah tertangani pada 2023 adalah 55.926,26 ton/tahun dan total sampah yang dikurangi sebesar 28.108,32 ton/tahun. Sehingga total pengelolaan sampah selama tahun 2023 sebesar 84.034,58 ton/tahun. Sedangkan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 sebesar 193.583,44 ton/tahun. Maka sampah yang tertangani sebesar 43,41% dari target 42,55%. Meskipun target kinerja telah terlampaui, namun sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jombang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, target penanganan sampah adalah sebesar 70% dari timbulan sampah dan target pengurangan sampah adalah 30% dari timbulan sampah. Target tersebut harus dapat dicapai pada tahun 2025.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pemerintah memiliki satu indikator, yaitu nilai evaluasi SAKIP dengan target mendapatkan kategori A dengan nilai 80,12. Penilaian SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2023 memberikan nilai akhir 80,22 (kategori A). Dengan demikian target kinerja telah terlampaui dengan capaian kinerja sebesar 100,12%.

Keberhasilan pencapaian target sasaran di atas tidak luput dari keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan pada tahun 2023. Dari 8 program, 15 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun

2023, terdapat 1 program, 8 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan rutin di bagian sekretariat. Sisanya adalah program dan kegiatan di bidang dan UPT. Keseluruhan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mendukung keberhasilan pencapaian sasaran. Uraian di bawah ini menjabarkan keterkaitan sasaran dengan program, kegiatan serta sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dapat diketahui bahwa kualitas air sungai di Kabupaten Jombang seluruhnya berada dalam status cemar ringan. Sedangkan kualitas udara ambient mengalami trend kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Permasalahan lingkungan hidup semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang tidak mudah. Meskipun target kinerja telah tercapai, bukan berarti penanganan permasalahan lingkungan hidup telah selesai. Berbagai hambatan dan keterbatasan selalu ada dalam upaya untuk melakukan pemantauan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Penurunan kualitas, kuantitas dan kontinyuitas sumber daya air
2. Belum optimalnya penyelesaian kasus LB3 kab. Jombang
3. Belum optimalnya pelayanan pengelolaan persampahan
4. Peningkatan bencana akibat perubahan iklim

Kendala beserta keterbatasan yang ada tentunya berdampak pada pencapaian agenda pembangunan. Agenda prioritas ke-6 dalam RPJMN adalah **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**, yang salah satunya diwujudkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Tema Pembangunan pada tahun 2024-2026 adalah “Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbasis Agribisnis” sedangkan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 adalah “Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Industri Agribisnis dan Pembangunan Wilayah”. Sasaran strategis

dari tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Infrastruktur Permukiman (20% dari Kinerja PengelolaanSampah).

Dampak adanya berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian agenda prioritas RPJMN dan tujuan Pj. Kepala Daerah seperti yang tertuang dalam RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Kerusakan Lahan dan Keanekaragaman Hayati Karena Eksploitasi Sumber Daya Alam
2. Penurunan Kualitas, Kuantitas Dan Kontinuitas Sumber Daya Air Sumber daya air.
3. Peningkatan Bencana Akibat Perubahan Iklim.

Tantangan yang dihadapi pada tahun ke depan adalah semakin tidak menentunya perubahan iklim global. Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan mengakibatkan kekeringan di musim kemarau dan banjir pada musim hujan. Meskipun berbagai upaya penanggulangan dampak perubahan iklim seperti pembuatan sumur resapan, lubang biopori, biogas dan lain-lain telah dilakukan, namun laju kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan upaya pencegahan dan penanggu-langannya. Upaya-upaya mitigasi dampak perubahan iklim harus terus dilakukan dengan lebih masif. Menyikapi kondisi di atas tentunya diperlukan langkah-langkah strategis agar semua kekurangan yang ada dapat segera diatasi, sehingga diharapkan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.

Dalam rangka mencapai Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang diperlukan Arah Kebijakan dan Strategi yang memadai. Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, ArahKebijakan yang dipilihadalahmeningkatkan perbaikan kualitas lingkungan hidup denganmeningkatkan kualitas air, udara dan lahan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, mencakup: kelembagaan, pengendalian dampak lingkungan, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta lingkungan yang bersih dan sehat. Sedangkan strategi yang dipilih adalah:

1. Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup melalui:

a. Penguatan mekanisme pelaksanaan dokumen lingkungan;
b. Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan sistem informasi lingkungan hidup;
c. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
d. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
e. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan;

2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui:
   a. Pengendalian pencemaran akibat limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air;
   b. Pengendalian pencemaran udara dari sektor industri;
   c. Peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca;
   d. Pemantauan kualitas udara ambien;
   e. Penguatan upaya rehabilitasi lahan;
   f. Peningkatan tutupan vegetasi;
   g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup;
   h. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya;
   i. Melindungi dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Sedangkan dalam rangka mencapai sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan, Arah Kebijakan yang ditetapkan adalah melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga lainnya yang meliputi peningkatan kinerja pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sedangkan Strategi yang ditetapkan adalah:

a. Melaksanakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria baik dalam upaya pengurangan sampah maupun penanganan sampah
b. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan pengelola sampah
c. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi
d. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif

e. Penguatan komitmen bagi dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam ikut melakukan upaya pengurangan sampah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran OPD yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026. Selanjutnya, Renstra tersebut dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang dibuat setiap tahun. Pada awal tahun 2024 telah dilakukan penyusunan Renja tahun 2025 setelah memperhatikan hasil Musrenbang dan kondisi lingkungan hidup saat itu. Berikut hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup dibandingkan dengan rancangan awal RKPD.

TABEL 2.3

REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Rancangan Awal RKPD						Kode	Rancangan Awal RKPD						CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
2.11	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**						**2.11**	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**					**27.241.208.821**	
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Kab. Jombang**	**Persentase infrastruktur persampahan yang sesuai standar**	**100**	**persen**	**2.647.784.800**	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Kab. Jombang**	**Persentase infrastruktur persampahan yang sesuai standar**	**100**	**persen**	**504.966.950**	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Penambahan infrastruktur persampahan	132	unit	2.647.784.800	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Penambahan infrastruktur persampahan	9	unit	504.966.950	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Jombang	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1,92	ton/hari	2.647.784.800	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Jombang	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0,3	ton/hari	504.966.950	Penyesuaian Jumlah Lokasi dengan anggaran yang tersedia sehingga target mengalami penurunan
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Jombang**	**Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur**	**100**	**persen**	**11.640.981.099**	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Jombang**	**Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur**	**100**	**persen**	**11.352.523.741**	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100	persen	45.062.500	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100	persen	28.000.000	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	22.077.500	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	17.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Kode	Rancangan Awal RKPD						CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	22.985.000	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	11.000.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	persen	5.903.943.049	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	persen	5.947.911.176	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	orang/bulan	5.681.135.549	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	orang/bulan	5.775.360.176	
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	212.718.000	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	164.551.500	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	laporan	10.089.500	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	laporan	7.999.500	
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100	persen	27.500.000	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100	persen	15.000.000	
2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	27.500.000	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	15.000.000	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100	persen	21.000.000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100	persen	21.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Kode	Rancangan Awal RKPD						CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Jombang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	paket	21.000.000	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Jombang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	paket	21.000.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	541.387.450	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	448.412.725	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	76.446.100	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	50.000.000	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	55.593.400	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	39.489.350	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	264.926.250	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	243.581.575	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	47.487.700	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	24.999.800	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	4.704.000	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	2.352.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46	laporan	92.230.000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46	laporan	87.990.000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	4.556.195.600	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	4.463.837.340	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Kode	Rancangan Awal RKPD						CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	3.630.924.000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	3.630.924.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	925.271.600	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	832.913.340	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	545.892.500	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	428.362.500	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	40.292.500	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	40.292.500	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	Unit	433.350.000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	unit	346.500.000	
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80	Unit	72.250.000	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	unit	41.570.000	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kab. Jombang**	**Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan**	**5,85**	**persen**	**3.194.519.325**	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kab. Jombang**	**Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan**	**5,85**	**persen**	**1.629.163.750**	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Kode	Rancangan Awal RKPD						CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah aktivitas yang mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan yang dilakukan	4	kegiatan	2.476.640.875	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah aktivitas yang mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan yang dilakukan	4	kegiatan	1.145.577.150	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	dokumen	234.972.000	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	dokumen	199.508.250	Terbangunnya 6 unit Biogas
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Jombang	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	76	lokasi	347.617.500	2.11.03.2.01.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Jombang	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	55	lokasi	254.437.500	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran yang tersedia
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kab. Jombang	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	3	dokumen	457.523.250	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kab. Jombang	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2	dokumen	207.188.750	Tersusunnya 2 dokumen IKLH dan IKPLHD
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	620	dokumen	1.671.500.125	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	600	dokumen	484.442.650	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran yang tersedia
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1. Jumlah lokasi pemulihan LB3	3	lokasi	717.878.450	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1. Jumlah lokasi pemulihan LB3	1	lokasi	483.586.600	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Kode	Rancangan Awal RKPD						CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
		Kab. Jombang	2. Luas lahan yang ditangani untuk pemulihan pencemaran (Konservasi)	1,85	ha				Kab. Jombang	2. Luas lahan yang ditangani untuk pemulihan pencemaran (Konservasi)	1,75	ha		
2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	Kab. Jombang	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	kegiatan	90.702.750	2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	Kab. Jombang	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	kegiatan	94.314.000	
2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Kab. Jombang	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	1	kegiatan	326.153.200	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Kab. Jombang	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	1	kegiatan	222.454.550	
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Jombang	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	kegiatan	301.022.500	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Jombang	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	kegiatan	166.818.050	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kab. Jombang**	**Persentase Penambahan luas tutupan lahan**	**33,33**	**persen**	**11.289.343.450**	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kab. Jombang**	**Persentase Penambahan luas tutupan lahan**	**52,67 %**	**persen**	**2.370.623.250**	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Luasan tutupan RTH (RTH Perkotaan + Taman Kehati)	1,5	ha	11.289.343.450	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Luasan tutupan RTH (RTH Perkotaan + Taman Kehati)	1,185	ha	2.370.623.250	Penyesuaian target kinerja dengan jumlah bibit yang teranggarkan
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Jombang	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	unit	228.795.350	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Jombang	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	unit	180.766.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Jombang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11,67	ha	11.048.268.100	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Jombang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11,67	ha	2.177.577.250	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Kode	Rancangan Awal RKPD						CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60	orang	12.280.000	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60	orang	12.280.000	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kab. Jombang**	**Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan**	**100**	**persen**	**518.534.480**	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kab. Jombang**	**Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan**	**100**	**persen**	**237.000.100**	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1. Persentase rekomendasi teknis dan Persetujuan Lingkungan yang dinilai kelayakannya	100	persen	518.534.480	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1. Persentase rekomendasi teknis dan Persetujuan Lingkungan yang dinilai kelayakannya	100	persen	237.000.100	
		Kab. Jombang	2. Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	20	persen				Kab. Jombang	2. Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	20	persen		
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Jombang	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3	dokumen	265.308.100	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Jombang	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3	dokumen	146.624.350	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Kode	Rancangan Awal RKPD						CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	175	badan usaha	253.226.380	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	125	badan usaha	90.375.750	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kab. Jombang**	**Persentase lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup**	**77,66**	**persen**	**399.643.774**	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kab. Jombang**	**Persentase lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup**	**88,83**	**persen**	**359.872.100**	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1.Jumlah Lembaga Masyarakat perduli dan berbudaya lingkungan aktif	126	lembaga	399.643.774	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1.Jumlah Lembaga Masyarakat perduli dan berbudaya lingkungan aktif	139	lembaga	359.872.100	
		Kab. Jombang	2. Jumlah kader aktif yang didampingi	20	orang				Kab. Jombang	2. Jumlah kader aktif yang didampingi	20	orang		
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Jombang	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	dokumen	43.333.100	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Jombang	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	dokumen	25.176.850	
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Jombang	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	300	orang	161.252.550	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Jombang	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	200	orang	105.869.100	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran yang tersedia

Kode	Rancangan Awal RKPD						Kode	Rancangan Awal RKPD						CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Jombang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	264	lembaga	399.643.774	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Jombang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	256	lembaga	228.826.150	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kab. Jombang**	**Persentase laporan penanganan pengaduan yang diterbitkan.**	**100**	**persen**	**257.329.000**	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kab. Jombang**	**Persentase laporan penanganan pengaduan yang diterbitkan.**	**100**	**persen**	**80.469.300**	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	persen	257.329.000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	persen	80.469.300	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	40	pengaduan	257.329.000	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	35	pengaduan	80.469.300	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kab. Jombang**	**Persentase layanan pengelolaan persampahan**	**42,95**	**persen**	**13.172.990.766**	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kab. Jombang**	**Persentase layanan pengelolaan persampahan**	**45,06**	**persen**	**10.706.589.630**	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Kab. Jombang	Jumlah sampah yang dikelola (penanganan + pengurangan)	84.650	ton/tahun	13.172.990.766	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Kab. Jombang	Jumlah sampah yang dikelola (penanganan + pengurangan)	87.302,10	ton/tahun	10.706.589.630	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Kode	Rancangan Awal RKPD						CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Jombang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1	kelompok	615.943.000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Jombang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1	kelompok	602.344.500	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	13	unit	3.181.085.000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2	unit	100.000.000	PokirDPRD untuk pengadaan 2 unit kendaraan Roda 3
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. Jombang	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	67.232	ton	4.808.087.560	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. Jombang	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	57.277,99	ton	3.612.385.990	
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kab. Jombang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	56	unit	3.453.473.076	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kab. Jombang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	52	unit	2.315.058.400	
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Jombang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	39.549	ton	950.512.200	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Jombang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	30.024,11	ton	735.908.100	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Jombang	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	67.246	ton	3.960.917.930	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Jombang	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	57.295,99	ton	3.340.892.640	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Kode	Rancangan Awal RKPD						CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kab. Jombang	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1	dokumen	100.000.000	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kab. Jombang	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	N/A	dokumen	-	Tidak dapat dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026 dan mengacu pada RKPD yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta dengan memperhatikan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang baru. Usulan program dan kegiatan berasal dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi maupun perguruan tinggi yang merupakan hasil dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai dengan musrenbang kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan APBD 2024 yang nantinya digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.4

Usulan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No.	Kegiatan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Alasan/Keterangan
1	Pengadaan bibit pohon untuk daerah sekitar sumber mata aiur	- Urgensi pelestarian sumber mata air - Memberikan stimulasi pada kelompok masyarakat yang sudah melakukan kegiatan pelestarian hutan - Mencegah didirikannya bangunan pada radius 200m dari mata air.	KTH Kepuh Wonosalam	1 kegiatan	APBD	(Akomodir) Pada tahun 2024 telah dialokasikan sebanyak 500 bibit tanaman untuk KTH Kepuh. Untuk tahun selanjutnya akan dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan penganggaran di DLH
2	Pengurangan tarif pembuangan sampah ke TPA untuk bank sampah unit dan TPS3R	Beban operasional bank sampah dan TPS3R terlalu tinggi dan tidak mampu ditutup oleh margin bank sampah dan TPS3R.	Desa Mojokrapak	1 kegiatan	APBD	(Belum diakomodir) Penerapan tarif retribusi telah sesuai dengan Perda Kab. Jombang No. 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun demikian, bank sampah/ TPS3R dapat bersurat ke DLH jika keberatan dengan besaran tarif tsb. dan akan dilakukan pengkajian terlebih dahulu.

No.	Kegiatan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Alasan/Keterangan
3	Pembersihan Sungai Bapang dan pemeliharaan kualitas air sungai	Sungai Bapang tercemar limbah tahu dan limbah kotoran sapi	Desa Sumbermulyo Jogoroto	1 kegiatan	APBD	(Akomodir) DLH telah mengupayakan kebersihan sungai Bapang melalui pendirian IPAL tahu dan kegiatan fitoremediasi yang sudah diinisiasi mulai tahun 2023. Harapannya Dinas Peternakan dapat membantu penanganan limbah kotoran sapi di Bapang.
4	Pengangkutan sampah di TPS Candimulyo	Banyaknya volume sampah di TPS Candimulyo merupakan sampah kiriman dari daerah lain, padahal sudah ada beberapa TPS3R baru di sekitarnya, namun masyarakat masih membuang sampah ke TPS Candimulyo sehingga volume sampahnya menjadi tinggi	Desa Candimulyo	1 kegiatan	APBD	(Akomodir) Volume sampah yang tinggi di TPS Candimulyo karena TPS3R di sekitarnya belum beroperasi optimal. Akan dilakukan evaluasi berkala, jika seiring berjalannya waktu volume sampah di TPS Candimulyo tidak berkurang, maka DLH akan menambah ritasi pengambilan agar tidak terjadi penumpukan sampah.

No.	Kegiatan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Alasan/Keterangan
5	Penertiban daerah sekitar Jl. Gus Dur dari angkringan	Dikhawatirkan menjadi sumber penyakit sosial seperti narkoba, miras, prostitusi, dsb.	Jl. Gus Dur	1 Kegiatan	APBD	(Tidak Diakomodir) Masalah penertiban bukan menjadi kewenangan DLH, yang menjadi kewenangan DLH hanya masalah fasum RTH-nya.
6	Program Adiwiyata mendapatkan dukungan dana dari APBD untuk sekolah dibawah naugan Kemenag	Banyak sekolah dibawah naungan Kemenag mengeluhkan masalah tingginya dana yang harus dikeluarkan dalam rangka mengikuti program adiwiyata	Sekolah - sekolah di bawah naungan Kemenag	1 kegiatan	APBD	(Tidak Diakomodir) DLH memfasilitasi pendampingan untuk program adiwiyata, namun untuk pendanaan bukan menjadi kewenangan DLH. Terlebih lagi, persyaratan adiwiyata seharusnya tidak membutuhkan biaya besar jika sudah menjadi *habbit* di sekolah

Tahap selanjutnya, semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Rencana Strategis, serta isu-isu strategis yang berkembang terkait dengan lingkungan hidup. Hasil pencermatan usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja. Rancangan Renja tersebut selanjutnya dibahas dalam forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum OPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten, maka ditetapkan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025 yang memuat 8 program dan 15 Kegiatan dan 41 Sub kegiatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Pemerintah Indonesia Tahun 2020-2024 adalah: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Berdasarkan visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Selain visi dan misi pembangunan nasional, sembilan Agenda pembangunan (Nawacita) juga dijadikan dasar penyusunan Prioritas Nasional, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadian Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strateis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Dari tema dan unsur-unsur pokok yang menjadi arah serta kebijakan pembangunan nasional tersebut disusun 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2024. Sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dengan isu strategis yang ada tersaji dalam matrik berikut:

Tabel 3.1
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Wilayah Sumatera 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali 3. Pembangunan Wilayah Nusa

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
		Tenggara 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi 6. Pembangunan Wilayah Maluku 7. Pembangunan Wilayah Papua
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda 6. Pengentasan Kemiskinan 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Infrastruktur Pelayanan Dasar 2. Infrastruktur Ekonomi 3. Infrastruktur Perkotaan 4. Energi dan Ketenagalistrikan 5. Transformasi Digital
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim 3. Pembangunan Rendah Karbon
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Konsolidasi Demokrasi 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri 3. Penegakan Hukum Nasional 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, diolah

Prioritas pembangunan nasional ke-6, yakni Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim beserta program prioritasnya menjadi acuan rencana kerja pemerintah daerah khususnya di bidang lingkungan hidup. Selain itu, pada bab IV Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 tentang Fokus pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan. Kebijakan utama pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada tahun 2024 diprioritaskan kepada :

(a) Penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara terintegrasi yang disertai

dengan penguatan kelembagaan dan penegakan hukum dibidang lingkungan hidup, termasuk penanganan limbah medis pascapandemi COVID-l9

(b) Penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi, tektonik, vulkanik, hidrometeorologi, dan lingkungan) serta bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan meluasnya penyebaran penyakit menular/pandemi) yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam rangka reformasi (penguatan) sistem ketahanan bencana; serta

(c) Peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) pada masa pemulihan aktivitas sosial-ekonomi Indonesia, dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi.

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah tahun 2024, khususnya bidang lingkungan hidup. Keselarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor penting tercapainya tujuan pembangunan nasional.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.2.1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah :

1. **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman**

   Indikator tujuan tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target akhir Renstra 62,33 poin dan Indeks Infrastruktur Permukiman (sebesar 20%) dengan target akhir renstra sebesar 1,898.

2. **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi**

   Indikator Tujuannya adalah Indeks Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dengan target sebesar 68 pada akhir tahun renstra 2026.

3.2.2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategi Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan.

   Sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah

   - Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target sebesar 52,005 Poin.
   - Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan target sebesar 81,5 Poin.
   - Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan target sebesar 43,645 Poin.

   yang disupport oleh beberapa program sebagai berikut :

   a. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
   b. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
   c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
   d. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
   e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

2. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan.

   Sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah Indeks Layanan Pengelolaan Persampahan dengan target sebesar 9,012%, yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pemerintah

   Sebagai Indikator tercapainya sasaran ini adalah Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan target sebesar 81,2 Poin, yang ditentukan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang merencanakan 8 Program yang dijabarkan dalam 15

Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025 yang merupakan upaya mencapai Tujuan, Sasaran dalam RPD 2024-2026 dan pencapaian Tujuan dan Sasaran (Indikator Kinerja Utama) pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026.

Berikut rincian Program dan Kegiatan setelah pemutakhiran pada Rencana Kerja DLH tahun 2025.

A. Untuk menangani **Isu Strategis Penurunan kualitas, kuantitas dan kontinyuitas sumber daya air** dilaksanakan beberapa program sebagai berikut :

1. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**

   Program ini memiliki indikator Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan dengan target 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

   - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator :
     a. Persentase rekomendasi teknis dan Persetujuan Lingkungan yang dinilai kelayakannya dengan target 100%
     b. Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan dengan target 20%

   Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

   a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
      - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 146.624.350,-
      - Keluaran : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
      - Target : 3 dokumen

   b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 90.375.750,-
- Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
- Target : 125 Badan Usaha

2. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini memiliki indikator Persentase laporan penanganan pengaduan yang diterbitkan dengan target 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota memiliki indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target 100%.

  Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

  a. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
     - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 80.469.300,-
     - Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani
     - Target : 35 pengaduan

3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Program ini memiliki indikator Persentase Penambahan luas tutupan lahan dengan target 52,67%. Target ini berbeda dengan target pda Renstra karena menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota memiliki indikator Luasan tutupan RTH dengan target 1,185 Ha yang merupakan akumulasi dari tahun 2024.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 2.177.577.250,-

- Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
- Target : 11,67 Ha

4. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 180.766.000,-
   - Keluaran : Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Target : 1 unit
5. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 12.280.000,-
   - Keluaran : Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
   - Target : 60 orang

B. Untuk menangani **Isu Strategis Penurunan kualitas, kuantitas dan kontinyuitas sumber daya air, Peningkatan bencana akibat perubahan iklim** dan **Isu Strategis Belum optimalnya penyelesaian kasus LB3 kab. Jombang** dilaksanakan pada Program berikut :

1. **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

   Program ini memiliki indikator Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan target 5,85 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

   - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota memiliki indikator Jumlah aktivitas yang mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan target 4 kegiatan.

   Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

   a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
      - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 254.437.500,-

- Keluaran : Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)
- Target : 55 Lokasi

b. Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 207.188.750,-
- Keluaran : Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun
- Target : 2 Dokumen

c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 199.508.250,-
- Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
- Target : 1 Dokumen

d. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 484.442.650,-
- Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
- Target : 600 Dokumen

2.1 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota memiliki indikator :

a) Jumlah lokasi pemulihan LB3 dengan target 1 lokasi
b) Luas lahan yang ditangani untuk pemulihan pencemaran (Konservasi) dengan target 1,75 Ha

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi
- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 94.314.000,-
- Keluaran : Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
- Target : 1 Kegiatan

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 222.454.550,-
   - Keluaran : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota
   - Target : 1 Kegiatan

c. Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 166.818.050,-
   - Keluaran : Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
   - Target : 1 Kegiatan

C. Untuk menangani **Isu Strategis Penurunan kualitas, kuantitas dan kontinyuitas sumber daya air dan Peningkatan bencana akibat perubahan iklim** dilaksanakan pada Program berikut :

1. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Program ini memiliki indikator Persentase lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup dengan target 88,83%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kegiatan :
  a) Jumlah kader aktif yang didampingi dengan target 20 Orang.
  b) Jumlah Lembaga Masyarakat perduli dan berbudaya lingkungan aktif 139 lembaga.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar 25.176.850,-
   - Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
   - Target : 1 dokumen

b. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 228.826.150,-
   - Keluaran : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH
   - Target : 256 lembaga

c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 105.869.100,-
   - Keluaran : Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat
   - Target : 200 orang

D. Untuk menangani **Isu Strategis Belum optimalnya pelayanan pengelolaan persampahan** dilaksanakan melalui 2 program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Program ini memiliki indikator Persentase layanan pengelolaan persampahan dengan target 42,95%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan indikator jumlah sampah yang dikelola ditargetkan sebanyak 87.302,10 ton/tahun. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

a. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 735.908.100,-
   - Keluaran : Jumlah sampah yang terdaur ulang
   - Target : 30.024,11 ton/tahun

b. Penanganan sampah melalui pengangkutan
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 3.612.385.990,-
   - Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
   - Target : 57.277,99 ton/tahun

c. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 3.340.892.640,-
   - Keluaran : jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
   - Target : 57.295,99 ton/tahun

d. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar 2.315.058.400,-
   - Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik
   - Target : 52 unit

e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar 602.344.500,-
   - Keluaran : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
   - Target : 1 kelompok

f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar 100.000.000,-
   - Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
   - Target : 2 unit

2. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Program ini memiliki indikator Persentase infrastruktur persampahan yang sesuai standar dengan target 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Penambahan infrastruktur

persampahan sejumlah 9 unit. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

b. Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 504.966.950,-
   - Keluaran : Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun
   - Target : 0,3 ton/hari

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini memiliki indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur dengan target 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

8.1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki indikator Persentase Pelaporan Aset Yang Tersusun Sesuai Aturan dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 15.000.000,-
   - Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   - Target : 1 laporan

8.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki indikator Persentase Pencairan Gaji Dan Tunjangan Asn Tepat Waktu dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 7.999.500,-
   - Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - Target : 2 laporan

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 164.551.500,-
   - Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Target : 4 dokumen

c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 5.775.360.176,-
   - Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
   - Target : 34 orang/bulan

7.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

a. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 2.352.000,-
   - Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
   - Target : 2 Dokumen

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 243.581.575,-
   - Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
   - Target : 1 paket

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 24.999.800,-
   - Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
   - Target : 1 paket

d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 50.000.000,-
   - Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
   - Target : 1 paket

e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 39.489.350,-
   - Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

- Target : 1 paket

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 87.990.000,-
   - Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Target : 46 laporan

7.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki indikator Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 41.570.000,-
   - Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
   - Target : 20 unit

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 40.292.500,-
   - Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
   - Target : 1 unit

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 346.500.000,-
   - Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
   - Target : 26 unit

7.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 3.630.924.000,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Target : 1 Laporan

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 832.913.340,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Target : 1 Laporan

7.6 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja PD Yang Tersusun Sesuai Aturan dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 11.000.000,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Target : 5 laporan

6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 17.000.000,-
- Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Target : 2 dokumen

TABEL 3.2
RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2023 USULAN PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN INDIKATIF ANGGARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase infrastruktur persampahan yang sesuai standar**	**Kab. Jombang**	**100**	**persen**	**504.966.950**	APBD		**100**	**persen**	**6.498.889.551**
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penambahan infrastruktur persampahan	Kab. Jombang	9	unit	504.966.950	APBD		54	unit	6.498.889.551
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Kab. Jombang	0,3	ton/hari	504.966.950	APBD		1,92	ton/hari	6.498.889.551
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur**	**Kab. Jombang**	**100**	**persen**	**11.352.523.741**	APBD		100	**persen**	**15.952.130.624**
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Kab. Jombang	100	persen	28.000.000	APBD		100	persen	36.571.723
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	2	dokumen	17.000.000	APBD		2	dokumen	19.683.510
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	5	laporan	11.000.000	APBD		5	laporan	16.888.213

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kab. Jombang	100	persen	5.947.911.176	APBD		100	persen	8.381.464.386
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	34	orang/bulan	5.775.360.176	APBD		35	orang/bulan	8.109.120.308
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	4	dokumen	164.551.500	APBD		4	dokumen	260.104.020
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	2	laporan	7.999.500	APBD		2	laporan	12.240.058
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	Kab. Jombang	100	persen	15.000.000	APBD		100	persen	33.275.000
2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang	1	laporan	15.000.000	APBD		1	laporan	33.275.000
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab. Jombang	100	persen	21.000.000	APBD		100	persen	21.000.000
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab. Jombang	1	paket	21.000.000	APBD		1	paket	21.000.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jombang	100	persen	448.412.725	APBD		100	persen	674.460.075
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	1	paket	50.000.000	APBD		1	paket	101.750.776
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	1	paket	39.489.350	APBD		2	paket	64.957.422
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	1	paket	243.581.575	APBD		4	paket	334.335.947

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Jombang	1	paket	24.999.800	APBD		2	paket	50.327.470
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Jombang	2	dokumen	2.352.000	APBD		2	dokumen	5.691.840
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	46	laporan	87.990.000	APBD		46	laporan	117.396.620
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Jombang	100	persen	4.463.837.340	APBD		100	persen	5.492.037.540
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Jombang	1	laporan	3.630.924.000	APBD		36	laporan	4.393.418.040
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	1	laporan	832.913.340	APBD		1	laporan	1.098.619.500
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kab. Jombang	100	persen	428.362.500	APBD		100	persen	1.313.321.900
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Jombang	1	unit	40.292.500	APBD		1	unit	117.987.100
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Jombang	26	unit	346.500.000	APBD		27	unit	525.079.500

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Jombang	2	unit	-	APBD		2	unit	605.000.000
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Jombang	20	unit	41.570.000	APBD		20	unit	65.255.300
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan**	**Kab. Jombang**	**5,85**	**persen**	**1.629.163.750**	**APBD**			**persen**	**2.251.410.000**
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas yang mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan yang dilakukan	Kab. Jombang	4	kegiatan	1.145.577.150	APBD		4	kegiatan	1.101.410.000
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Jombang	1	dokumen	199.508.250	APBD			dokumen	535.000
2.11.03.2.01.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Kab. Jombang	55	lokasi	254.437.500	APBD			lokasi	425.000
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Kab. Jombang	2	dokumen	207.188.750	APBD			dokumen	450.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kab. Jombang	600	dokumen	484.442.650	APBD			dokumen	1.100.000.000
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Jumlah lokasi pemulihan LB3	Kab. Jombang	1	lokasi	483.586.600	APBD		3	lokasi	1.150.000.000
		2. Luas lahan yang ditangani untuk pemulihan pencemaran (Konservasi)	Kab. Jombang	1,75	ha		APBD		2	ha	
2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kab. Jombang	1	kegiatan	94.314.000	APBD		1	kegiatan	200.000.000
2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Kab. Jombang	1	kegiatan	222.454.550	APBD		1	kegiatan	600.000.000
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kab. Jombang	1	kegiatan	166.818.050	APBD		1	kegiatan	350.000.000
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Penambahan luas tutupan lahan**	**Kab. Jombang**	**52,67%**	**persen**	**2.370.623.250**	**APBD**		**100**	**persen**	**5.040.641.916**
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan tutupan RTH (RTH Perkotaan + Taman Kehati)	Kab. Jombang	1,185	ha	2.370.623.250	APBD		2,25	ha	5.040.641.916
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1	unit	180.766.000	APBD		1	unit	373.119.600
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	11,67	ha	2.177.577.250	APBD		11,67	ha	4.653.347.316

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Jombang	60 orang	12.280.000	APBD		60	orang	14.175.000
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan**	**Kab. Jombang**	**100 persen**	**237.000.100**	**APBD**		**100**	**persen**	**400.000.000**
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase rekomendasi teknis dan Persetujuan Lingkungan yang dinilai kelayakannya	Kab. Jombang	100 persen	237.000.100	APBD		100	persen	400.000.000
		2. Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Kab. Jombang	20 persen		APBD		20	persen	-
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab. Jombang	3 dokumen	146.624.350	APBD		3	dokumen	220.000.000
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Jombang	125 badan usaha	90.375.750	APBD		105	badan usaha	180.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup**	**Kab. Jombang**	**88,83**	**persen**	**359.872.100**	**APBD**		**100**	**persen**	**564.000.000**
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.Jumlah Lembaga Masyarakat perduli dan berbudaya lingkungan aktif	Kab. Jombang	139	lembaga	359.872.100	APBD		152	lembaga	564.000.000
		2. Jumlah kader aktif yang didampingi	Kab. Jombang	20	orang		APBD		25	orang	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Jombang	1	dokumen	25.176.850	APBD		1	dokumen	41.000.000
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	Kab. Jombang	200	orang	105.869.100	APBD		240	orang	130.000.000
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kab. Jombang	256	lembaga	228.826.150	APBD		269	lembaga	393.000.000
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase laporan penanganan pengaduan yang diterbitkan.**	**Kab. Jombang**	**100**	**persen**	**80.469.300**	**APBD**		**100**	**persen**	**200.000.000**
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Kab. Jombang	100	persen	80.469.300	APBD		100	persen	200.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Kabupaten/Kota										
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Jombang	35	pengaduan	80.469.300	APBD		35	pengaduan	200.000.000
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase layanan pengelolaan persampahan**	**Kab. Jombang**	**45,06**	**persen**	**10.706.589.630**	**APBD**		**47,45**	**persen**	**24.842.095.127**
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola (penanganan + pengurangan)	Kab. Jombang	87.302,10	ton/tahun	10.706.589.630	APBD		93.520,55	ton/tahun	24.842.095.127
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Jombang	1	kelompok	602.344.500	APBD		1	kelompok	737.209.743
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Jombang	2	unit	100.000.000	APBD		9	unit	10.665.196.845
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Kab. Jombang	57.277,99	ton	3.612.385.990	APBD		72.073	ton	4.904.529.421
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kab. Jombang	52	unit	2.315.058.400	APBD		60	unit	2.756.143.663
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Kab. Jombang	30.024,11	ton	735.908.100	APBD		42.554	ton	1.320.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	sampah										
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Jombang	57.295,99	ton	3.340.892.640	APBD		72.087	ton	4.459.015.455
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	Kab. Jombang	-	dokumen	-	APBD		1	dokumen	100.000.000
JUMLAH						**27.241.208.821**					**55.749.167.218**

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan menjadi pedoman pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Jombang secara tepat dan terencana sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Demikian Rencanan Kerja inidisusun dengan harapan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan tahun 2025 dapat tercapai.

Jombang, 13 Juli 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

MIFTAHUL ULUM, S.T, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19710117 200112 1 003